

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wartawan memang bukan sejarawan. Sesuai dengan tugas utamanya dia meliput dan menuliskan fakta di lapangan, peristiwa, realitas sosial, dan fenomena menjadi berita. Namun rangkaian fakta sosial yang ditulis wartawan dari waktu ke waktu itu dapat menjadi bahan referensi atau kajian sejarah. Keberadaan pers dan media massa sendiri juga dapat menjadi bagian penting dari proses perjalanan sejarah.¹

Dunia pers Indonesia menjadi salah satu bidang kehidupan manusia yang menarik untuk dikaji. Media pers tak henti-hentinya merekonstruksi fakta menjadi berita untuk disajikan kepada masyarakat. Sebab melalui pers masyarakat dapat membuat dan menerima bahkan menyebarkan informasi yang tidak terbatas wilayah. Kebebasan pers seperti saat ini tentu tidak mudah didapatkan. Butuh proses dan perjuangan panjang untuk mencapainya. Sebab selalu ada tantangan bagi pers pada setiap zamannya. Tentunya selalu ada hal menarik di setiap zaman yang berhubungan dengan pers. Seperti terjadinya berbagai kasus pembredelan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pers yang dianggap tidak *sejalan*, yang banyak terjadi pada masa rezim orde baru. Sebab pemberitaan media massa kerap kali mempengaruhi wacana dan persepsi publik. Pemberitaan yang bersifat negatif bagi pemerintah tentu merugikan pemerintah yang berkuasa. Oleh karena itulah berbagai kasus pembredelan ini terjadi. Era Orde Baru bisa dikatakan sebagai laboratorium yang sangat menarik untuk mengkaji keberadaan media pers di tengah masyarakat dan negara.² Pada mulanya rezim ini memberikan angin segar terhadap insan pers di mana sejumlah surat kabar yang dibredel kembali diperbolehkan terbit. Akan tetapi tak berapa lama berselang banyak terjadi kasus pembredelan di berbagai daerah di Indonesia akibat dari

¹ Y.B Margantoro, *Biar Berita Bicara*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2001), hlm. 1.

² Ashadi Siregar, "Media Pers dan Negara : Keluar dari Hegemoni", dalam *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada*, Vol. 4, No.2 : hlm.178, 2000.

tidak selarasnya pemikiran pemerintah dengan si penulis dan banyaknya tulisan-tulisan yang *ekstrem*.

Salah satu pemberitaan pada era Orde Baru yang cukup menjadi perhatian serius insan pers adalah kebijakan Repelita yang dilakukan pemerintah. Pemberitaan terkait kebijakan ini juga banyak mempengaruhi anggapan dan wacana publik kala itu. Repelita adalah sebuah program pembangunan yang direntangkan pada masa pemerintahan Soeharto. Repelita sendiri merupakan kepanjangan dari Rencana Pembangunan Lima Tahun. Suatu program pembangunan jangka pendek berkelanjutan yang memiliki periode setiap lima tahun. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan sosial. Program ini juga bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi berdasarkan sistem ekonomi terbuka. Program ini diharapkan memberikan hasil yang baik, sehingga dapat membuat kepercayaan pihak barat terhadap prospek ekonomi Indonesia. Dengan demikian Indonesia mulai memasuki pertumbuhan ekonomi yang mengesankan. Modal asing pun berdatangan. Tak pelak, pembangunan pun seolah menjadi ikon kepemimpinan era Orde Baru. Tidak mengherankan jika Soeharto disebut sebagai bapak pembangunan.

Selama pemerintahan Orde Baru, Repelita telah dilakukan sebanyak enam kali sejak tahun 1969 hingga pada kejatuhan Orde Baru, 1998. Sejak dimulainya, program pembangunan ini mengalami jatuh bangun hingga mendulang keberhasilan yang luar biasa dan kemudian kembali terjatuh. Salah satunya adalah pada Repelita V yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1989-1994. Pada periode ini terjadi naik turun perekonomian di Indonesia. Sebenarnya Repelita

V ini mencapai keberhasilan yang luar biasa hingga memiliki slogan “tinggal landas”³ namun yang terjadi kemudian adalah gagal landas pada Repelita selanjutnya. Hal ini selain disebabkan oleh faktor internal juga dikarenakan faktor eksternal. Kondisi politik baik di dalam maupun di luar negeri mengalami naik turun dan tidak stabil. Mulai dari praktek KKN yang semakin marak dan terang-terangan, di samping itu juga dipengaruhi oleh situasi politik luar negeri yang semakin tidak stabil pula. Situasi ini dimulai sejak akhir 1980-an di mana Indonesia dan konteks internasional berubah drastis. Hal ini disebabkan oleh berakhirnya perang dingin dan keruntuhan serta pecahnya Uni Soviet mengartikan bahwa pemerintahan demokratis Barat tidak begitu lagi melihat perlunya kerja sama dengan rezim-rezim Dunia Ketiga. Pada saat yang sama, perkembangan-perkembangan itu mengarahkan pemerintah Indonesia dan militer untuk meningkatkan kekerasan, karena mereka khawatir Indonesia dengan segala potensi kekerasan etnisnya juga akan runtuh seperti Soviet. Situasi ini kemudian semakin memperburuk amarah masyarakat dalam negeri yang telah lama terpendam. Pemberontakan demi pemberontakan dilakukan hingga periode ini menjadi periode genting dan menyesak.

Konflik demi konflik yang terjadi dalam kisaran tahun 1989-1994 tampaknya menjadi magnet yang menarik media pers. Sehingga kemudian dijadikan sumber berita dan berada di headline-headline surat kabar dan berbagai media pers lainnya. Akibat yang ditimbulkan kemudian, masyarakat yang setiap harinya disugahi pemberitaan-pemberitaan ini pada akhirnya memiliki wacana maupun persepsi masing-masing terhadap pemerintah yang berkuasa. Sehingga semakin banyak pemberontakan dan perlawanan-perlawanan dari rakyat. Hingga pada tahun

³ Slogan ini menjadi ciri khas dari Repelita V sebab pada masa itu pembangunan di Indonesia mengalami keberhasilan dan kegemilangan yang luar biasa, sehingga kemudian pada Repelita VI yang merupakan kelanjutannya pemerintah memiliki slogan “tinggal landas” namun yang terjadi kemudian adalah “gagal landas” akibat dari jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada momen Reformasi Mei 1998.

1994, pemerintah yang geram melakukan pencabutan izin penerbitan terhadap tiga terbitan besar dan legal, yakni TEMPO, EDITOR dan DETIK. Tanpa dapat diprediksi sebelumnya, ternyata dengan membungkam tiga terbitan legal tersebut, muncullah terbitan bawah tanah atau tanpa izin yang kapasitasnya untuk mengkritik pemerintah jauh lebih besar daripada terbitan ‘jalur tengah’ yang dihilangkan. Juga dengan membreidel ketiga terbitan yang disegani ini, telah menciptakan solidaritas kalangan menengah, buruh, intelektual, serta kaum pemodal yang kesemuanya bersatu padu dan pada akhirnya menolak kelangsungan pemerintahan Orde Baru.⁴ Sehingga kemudian media pers digunakan sebagai alat perjuangan bangsa.

Salah satu daerah yang menjadi saksi bisu perjuangan pers adalah Surabaya. Sebagai kota yang besar dan ibu kota provinsi Jawa Timur, Surabaya tentu menyimpan banyak cerita mengenai pers dan penyalur aspirasi rakyat. Ditambah lagi dengan banyaknya perguruan tinggi yang ada di Surabaya dan menjamurnya sejumlah penerbitan di pusat kota ini. Sebab Surabaya sebagai pusat kota dan pusat peradaban ini kemudian menjadi magnet bagi imigran dari berbagai daerah. Oleh karena itu, opini publik dengan mudahnya terbentuk di kota ini.

Hubungan antara pers dan pemerintah dalam kerangka mencari dan membuat berita, bukanlah hubungan sepihak, melainkan senantiasa timbal balik antara dua pihak. Ada peranan pemerintah, ada peranan pers. Akan menarik, jika misalnya diteliti-dalam proses hubungan timbal balik itu-siapa lebih kuat, siapa mempengaruhi siapa, dan dalam kadar yang bagaimana⁵.

⁴ Inge Hutagalung, “Dinamika Sistem Pers di Indonesia”, dalam *Jurnal Interaksi*, Vol.2, No.2 : hlm.57, 2013.

⁵ Jakob Oetama, *Pers Indonesia : Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Tulus*, (Jakarta:Penerbit Buku Kompas, 2001), hlm.245.

Akan selalu ada hubungan yang saling berkaitan antara pemerintah yang mengelola negara dengan pers sebagai media pencari, pembuat dan penyebar informasi.

Pers sebagai salah satu wadah komunikasi masyarakat, sangat memungkinkan dijadikan sebagai alat perjuangan bangsa dan manifestasi politik di Indonesia. Sehingga penelitian ini akan melihat seberapa jauh surat kabar di Surabaya membahas kebijakan pemerintah pusat dalam pemberitaannya serta usaha-usaha untuk menciptakan wacana publik di kota Surabaya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi singkat pada latar belakang yang telah disampaikan di atas maka peneliti memfokuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pemberitaan surat kabar di Surabaya terhadap kebijakan Repelita V tahun 1989-1994?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberitaan surat kabar di Surabaya terhadap kebijakan Repelita V serta usaha-usaha untuk menciptakan wacana publik di kota Surabaya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kondisi persuratkabaran di Surabaya pada tahun 1989-1994.
- b. Untuk mengetahui pengaruh pemberitaan politik seputar kebijakan Repelita V melalui surat kabar di Surabaya tahun 1989-1994.

1.4 Batasan dan Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis jabarkan di atas, maka penelitian ini dibatasi dengan tiga hal, yaitu spasial, temporal dan tematik. Ketiga batasan ini menjadi ciri khas dalam tulisan sejarah. Selain itu juga agar pembahasan dalam penelitian ini nantinya tidak melebar dan bisa terfokus.

Batasan spasial dari penelitian ini adalah wilayah Kota Surabaya. Penulis mengambil ruang lingkup ini didasari dengan beberapa pertimbangan. Di antaranya adalah dengan fakta bahwa Surabaya merupakan ibukota provinsi Jawa Timur dan salah satu kota besar di Indonesia. Surabaya memiliki banyak penerbitan, seperti Jawa Pos, Surabaya Post, Surya, Memorandum, Bhirawa, Bangsa, Duta dan sebagainya. Kota Surabaya juga merupakan daerah pemasaran dan distribusi berbagai media massa dari kota lain, terutama terbitan ibukota Jakarta. Di kota ini juga tersebar wartawan dan koresponden media massa dari daerah lain yang setiap saat menyampaikan informasi tentang Surabaya dan Jawa Timur ke pusat penerbitannya.

Batasan temporal dari penelitian ini adalah tahun 1989-1994. Sebab ini adalah kurun waktu dari Repelita V, di mana pembangunan ditekankan pada sektor pertanian dan industri untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian lainnya serta menghasilkan barang ekspor. Sejalan dengan itu, maka pembangunan dalam bidang politik, sosial-budaya, pertahanan-keamanan dan lain-lain semakin ditingkatkan sepadan dan agar saling menunjang dengan pembangunan bidang ekonomi. Sehingga ketahanan nasional semakin terjamin. Namun demikian, terjadi krisis ekonomi yang disebabkan oleh situasi dan kondisi politik di dalam dan luar negeri yang kian memburuk. Di samping itu, awal tahun 1990-an bisa dibilang sebagai masa-masa genting bagi bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan sejak tahun 1992

hutang dari sektor swasta di Indonesia benar-benar menjadi masalah serius. Lagi-lagi pers menjadi salah satu pihak berperan dalam menyebarkan berita.

Batasan tematik dari penelitian ini, yaitu penulis mencoba untuk menguraikan bagaimana pemberitaan surat kabar di Surabaya terhadap kebijakan Repelita V serta bagaimana usaha-usaha yang dilakukan untuk menciptakan wacana publik di kota Surabaya.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian yang terkait dengan Pers sudah banyak dilakukan. Namun sepanjang pengetahuan penulis, belum ada penelitian yang terkait dengan pemberitaan surat kabar di Surabaya terhadap kebijakan Repelita V tahun 1989-1994. Laporan penelitian yang dilakukan oleh Subandi Rianto berjudul *Pemberitaan Kedaulatan Rakyat Terhadap Kebijakan Restrukturisasi dan Rasionalisasi Angkatan Perang 1947-1948*⁶ membahas mengenai pandangan surat kabar Kedaulatan Rakyat dalam menyikapi kebijakan pemerintah mengenai reformasi militer di tahun 1947-1948. Program reformasi militer tersebut dikenal dengan Restrukturisasi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (ReRa AP). Studi ini melihat dan menganalisis pandangan surat kabar Kedaulatan Rakyat terhadap kebijakan pemerintah di dua kabinet yang berbeda, yaitu kabinet Amir syarifudin dan Kabinet Moh. Hatta. Pandangan Kedaulatan Rakyat diteliti dalam pemberitaan-pemberitaan (baik berbentuk tajuk atau kolom berita) selama periode kebijakan tersebut diusulkan oleh BP-KNIP di pertengahan tahun 1947 hingga dilaksanakan PM. Hatta di awal tahun 1948. Studi ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari kumpulan arsip surat kabar dalam kurun waktu 1947-1948 serta rujukan-rujukan mengenai pandangan politik surat kabar Kedaulatan Rakyat. Pemberitaan Kedaulatan Rakyat terhadap ReRa lebih banyak

⁶ Subandi Rianto, "Pemberitaan Kedaulatan Rakyat Terhadap Kebijakan Restrukturisasi Dan Rasionalisasi Angkatan Perang 1947-1948" dalam *skripsi* (Surabaya : Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya, 2013).

dipengaruhi semangat membangun demokrasi negara berbasis pers. Namun tetap didasari pada asas keadilan dan kesejahteraan yang tertuang dalam konstitusi negara.

Laporan penelitian lainnya dilakukan oleh Falentinus Laurensius Hartayan yang berjudul *Pembredelan Pers di Indonesia Tahun 1948-1961 (Kasus Surat Kabar Pedoman)*⁷ mengkhususkan pembahasannya pada pembredelan pers di Indonesia dengan mengambil salah satu kasus Surat Kabar Pedoman pada tahun 1961. Selain itu, penelitian juga memahami kaitan antara politik dengan surat kabar. Surat kabar ini merupakan salah satu surat kabar yang berkaitan dengan partai politik yang berafiliasi dengan PSI (Partai Sosialis Indonesia).

Selain itu, ada beberapa buku yang menjadi acuan penulis. Di antaranya adalah buku yang berjudul *Pers Indonesia, Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Tulus* yang ditulis oleh Jacob Oetama dan diterbitkan oleh Penerbit Buku Kompas pada tahun 2001.⁸ Buku ini membahas mengenai praktek komunikasi dalam kehidupan sehari-hari yang semakin “tidak tulus”. Ketidaktulusan di sini bisa diartikan bukan yang keluar dari pikiran dan hati yang sama, artinya komunikasi yang basa-basi dan tidak menyampaikan yang sebenarnya. Hal ini tak lepas dari imbas keterbukaan dan kemudahan akses informasi, entah itu melalui media surat kabar, televisi, internet maupun media pers lainnya. Meskipun tidak terlalu membahas mengenai bagaimana pemberitaan surat kabar di Surabaya terhadap kebijakan Repelita V serta usaha-usaha untuk menciptakan wacana publik di kota Surabaya, namun buku ini sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian. Penulis dapat menggunkan buku ini sebagai acuan untuk mengetahui

⁷ Falentinus Laurensius Hartayan, “Pembredelan Pers di Indonesia Tahun 1948-1961 (Kasus Surat Kabar Pedoman)” dalam *skripsi* (Surabaya : Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya, 2007).

⁸ Jacob Oetama, *op.cit.*

bagaimana keterkaitan masyarakat dan pers serta bagaimana cara masyarakat dalam memanfaatkan pers sebagai media berkomunikasi.

Buku lain yang masih berhubungan dengan penelitian penulis adalah *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia* karya Abdurrachman Surjomihardjo yang diterbitkan oleh Kompas pada tahun 2002.⁹Buku ini menjelaskan betapa penting peranan dan partisipasi pers Indonesia dalam pembangunan. Sehingga buku ini ditulis untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan serta peranan pers dari masa ke masa. Mulai dari penulisan sejarah ikhtisar perkembangan pers Belanda, Melayu Tionghoa, dan menjelang proklamasi kemerdekaan. Serta mengungkap segi khusus perkembangan pers Indonesia dalam konteks lokal dan daerah. Sehingga penulis dapat membandingkan bagaimana perkembangan pers yang dimaksudkan dalam buku tersebut dengan pemberitaan surat kabar di Surabaya terhadap kebijakan Repelita V tahun 1989-1994.

Buku-buku tersebut dapat memberikan beberapa pengetahuan kepada penulis mengenai pers dan beberapa hal yang terkait dengan penelitian ini. Namun buku-buku tersebut secara keseluruhan belum membahas secara detail mengenai pemberitaan surat kabar di Surabaya terhadap kebijakan Repelita V tahun 1989-1994.

1.6 Kerangka Konseptual

Pada dasarnya penelitian ini menjadikan surat kabar sebagai objek. Maka pendekatan yang digunakan menggunakan analisis-analisis berbasis teori komunikasi massa. Di mana pendekatannya bukan cenderung ke arah jurnalistik, melainkan pengkajian analisis wacana pemberitaan surat kabar. Analisis atas wacana-wacana yang disampaikan surat kabar sebagai

⁹ Abdurrachman Surjomihardjo, *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002).

pengontrol sosial pemerintah. Analisis wacana media sebagai pembangun konstruksi sosial, stigma dan kuasa masyarakat dicetuskan oleh filsuf Perancis, Michael Foucault. Yang mencetuskan konsep bahwa media mempunyai peran sebagai pembangun wacana dan konstruksi sosial sebagai bagian dari kekuasaan yang memberikan stigma kepada masyarakat.¹⁰

Berbekal dasar kerangka teori di atas, ada sedikit penjelasan khusus mengenai pemberitaan, pers beserta fungsinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah pemberitaan berasal dari kata dasar “berita” yang berarti cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, kabar. Jika mendapat imbuhan pe-an menjadi “pemberitaan” bisa dipahami sebagai proses, cara, perbuatan memberitakan (melaporkan, memaklumkan).¹¹ Para pencari dan pembuat berita biasanya memuat berita mereka dalam suatu media yang disebut dengan media massa, baik cetak maupun online.

Media merupakan industri yang berubah dan berkembang yang menciptakan lapangan kerja, barang dan jasa, serta menghidupkan industri lain yang terkait, media juga merupakan industri tersendiri yang memiliki peraturan dan norma-norma yang menghubungkan institusi tersebut dengan masyarakat dan institusi sosial lainnya. Sedangkan kata massa bisa didefinisikan sebagai khalayak ramai atau orang banyak (masyarakat).¹² Dewasa ini media massa yang semakin luas lingkupnya bisa dijadikan sebagai sumber kekuatan. Yang berfungsi sebagai alat kontrol, manajemen dan inovasi dalam masyarakat yang dapat didayagunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber daya lainnya. Jenis media massa yang tersedia saat ini adalah media massa

¹⁰ Subandi Rianto, *op. cit.*, hlm. 7.

¹¹ KBBI Offline.

¹² Dennis McQuail, *Teori Komunikasi Massa : Suatu Pengantar*, (Jakarta: Erlangga, 1987), hlm. 3.

cetak dan online. Keduanya sama-sama memiliki peranan, arti dan pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat.

Media cetak merupakan pelopor dari sejarah media modern. Meski pada awal kemunculannya tujuan dari percetakan ini adalah untuk memperbanyak teks yang sama atau hampir sama, namun pada perkembangannya dengan berbagai inovasi seperti surat kabar yang kadarnya lebih tinggi dari buku cetak, membuat media cetak semakin banyak diminati. Hingga pada perkembangan selanjutnya surat kabar dipaparkan sebagai serangkai perjuangan, kemajuan dan pengulangan yang mengarah ke iklim kebebasan, atau bisa juga dilihat sebagai kelanjutan dari sejarah kemajuan dan teknologi.¹³

Di era globalisasi saat ini semakin banyak kemudahan yang ditemui. Jarak dan waktu antar belahan dunia seakan tak lagi terasa, sebab yang jauh terasa dekat. Hal ini disebabkan oleh perkembangan teknologi yang semakin canggih. Salah satu dari produk kecanggihan teknologi yang paling “dibutuhkan” saat ini adalah media online. Media online disebut juga dengan media elektronik. Keberadaannya mampu menggeser televisi yang berjaya pada abad ke-20. Media online dengan segala kecanggihannya kini dapat dengan mudah diakses oleh siapapun dan dimanapun. Karena kemudahan ini, banyak masyarakat yang gencar memuat tulisan maupun pemberitaan di situs-situs online. Tulisan-tulisan ini banyak memberikan keuntungan bagi pengaksesnya karena kualitas tulisan penulisnya. Namun tidak sedikit tulisan maupun berita yang diragukan kebenarannya alias *hoax*. Jika terjadi kasus seperti ini, tentu ada masyarakat yang merasa dirugikan. Apalagi seringkali penulis berita abal-abal ini tidak bertanggung jawab dan

¹³*ibid.*, hlm. 10.

tidak mudah dilacak keberadaannya. Namun demikian, media online yang dengan *plus-minusnya* tetap merupakan bagian dari media yang termasuk dalam naungan pers.

Istilah pers sendiri berasal dari bahasa Inggris yakni *Press* yang berarti tekan, karena proses pembuatan media menggunakan alat cetak yang bentuknya menekan.¹⁴ Sedangkan menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dikatakan bahwa Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.¹⁵

Sesuai peran dan fungsinya, pers memiliki lima fungsi utama. Di mana salah satunya berperan sebagai kontrol sosial. Dalam hal ini pers berperan sebagai mediator yang mewadahi masyarakat dalam menyampaikan realitas sosial yang ada untuk kemudian disampaikan ke khalayak umum dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan dalam ruang kenegaraan.¹⁶ Dalam fungsi pers yang berkaitan dengan ruang kenegaraan (politik) ini, terdapat hubungan antara pers dengan pemerintah yakni ketika pers berhadapan dengan negara, maka terjadi ketertundukan terhadap kekuasaan yang ada. Misalnya dalam masa Orde Baru yang represif, aktifitas pers tidak berjalan dengan lancar. Berbeda dengan pers dalam era reformasi yang mengalami kebebasan, sehingga pers pada era ini mengarah ke pers liberal dengan segala dampak positif dan negatifnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pers tidak dapat berdiri sendiri, sebab pers akan selalu dipengaruhi oleh lembaga sosial yang lain. Namun tidak menutup kemungkinan jika

¹⁴ J. B. Wahyudi, *Komunikasi Jurnalistik; Pengetahuan Praktis Kewartawanan, Surat kabar-Majalah, Radio dan Televisi*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 87.

¹⁵ UU RI No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

¹⁶ J. B. Wahyudi, *op.cit.*, hlm. 91.

pers juga bisa mempengaruhi bidang kehidupan yang lain, misalnya instansi pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Tugas pers sebagai pengontrol sosial masyarakat diwujudkan melalui pemberitaan-pemberitaan mereka. Pada dasarnya pers merupakan pihak yang netral antara pemerintah dan masyarakat. Namun dinamika politik dan kepentingan yang melingkupinya seringkali mempengaruhi arah pemberitaan. Oleh sebab itu, perlu melihat lebih dalam keterlibatan kepentingan antara surat kabar dan narasi-narasi pemberitaan yang dimunculkan. Di sinilah teori analisis wacana sebagai kerangka konseptual dipergunakan untuk “membaca” pemberitaan.¹⁷

Karena pentingnya analisis wacana dalam penelitian ini, maka dirasa perlu untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai definisi dari analisis wacana. Analisis bisa diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Wacana adalah tulisan yang memiliki ciri struktur berita yang berisi tentang suatu peristiwa yang dipublikasikan melalui surat kabar. Dengan menguti pendapat dari Stubbs dan Cook, Aris Badara mengatakan bahwa analisis wacana ialah telaah mengenai aneka fungsi (pragmatik) bahasa. Dengan demikian analisis wacana merupakan suatu kajian yang meneliti atau menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Penggunaan bahasa secara alamiah tersebut berarti penggunaan bahasa seperti dalam komunikasi sehari-hari. Analisis wacana menekankan kajian penggunaan dalam konteks sosial, khususnya dalam interaksi antar-penutur.¹⁸

¹⁷ Subandi Rianto, *op. cit.*, hlm. 8.

¹⁸ Aris Badara, *Analisis Wacana : Teori, Metode dan Penerapannya pada Wacana Media*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 18.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan analisis wacana kritis yang bersifat Holistik dan Kontekstual. Hal tersebut didasarkan pada pendapat Eriyanto, bahwa kualitas suatu analisis wacana kritis akan selalu dinilai dari segi kemampuannya untuk mendapatkan teks dalam konteksnya yang utuh, Holistik, melalui pertautan antara analisis pada jenjang teks dan analisis terhadap konteks pada jenjang yang lebih tinggi. Di samping itu, kekuatan dari analisis wacana kritis adalah kemampuannya untuk melihat dan membongkar politik ideologi di dalam media. Hal tersebut penting karena di dalam wacana kritis diyakini bahwa teks adalah bentuk dari praktik ideologi atau pencerminan tertentu. Bahkan, teori-teori klasik tentang ideologi di antaranya menyatakan bahwa ideologi dibangun oleh kelompok yang dominan dengan tujuan untuk memproduksi dan melegitimasi dominasi mereka.¹⁹

1.7 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian historis karena mengungkapkan apa yang terjadi di masa lampau dengan disertai fakta dan sumber, selain itu juga dibatasi dengan temporal, yakni tahun 1989-1994. Dalam melakukan sebuah penelitian sejarah terdapat metode yang harus diterapkan, yaitu : pemilihan topik, heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (kritik sumber), interpretasi dan yang terakhir historiografi (penulisan).²⁰

Tahapan yang harus dilakukan pertama kali adalah pemilihan topik. Pemilihan topik pada penelitian ini didasarkan pada kedekatan emosional penulis dengan permasalahan mengenai pemberitaan yang berkaitan dengan pers dengan fokus pemberitaan surat kabar di Surabaya terhadap kebijakan Repelita V tahun 1989-1994. Hal ini diharapkan dapat mempermudah penulis

¹⁹ Aris Badara, *op. cit.*, hlm. 7-8.

²⁰ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2001), hlm. 91.

dalam melakukan penelitian. Dengan kedekatan emosional ini maka tidak menutup kemungkinan adanya subjektifitas dalam penelitian ini. Namun sebisa mungkin penulis mengusahakan agar subjektifitas tersebut merupakan subjektifitas yang rasional, bukan emosional.

Tahap selanjutnya adalah heuristik, yaitu pengumpulan sumber. Pada tahap ini penulis melakukan pengumpulan sumber baik tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan sifatnya, sumber digolongkan menjadi dua yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dijadikan sebagai sumber utama. Sumber primer merupakan sumber asli yang menjadi bukti sejaman dari suatu peristiwa. Sedangkan sumber sekunder merupakan sumber rujukan dalam penulisan sejarah.

Sumber dalam penelitian ini diambil dari berbagai tempat. Penulis menemukan sumber primer berupa koran-koran lama yang berkaitan di Perpustakaan Medayu Agung Surabaya, Perpustakaan Stikosa AWS Surabaya dan Monumen Pers Nasional di Solo. Beberapa surat kabar yang ditemukan adalah Jawa Pos, harian sore Surabaya Post, Surya, Kompas dan sebagainya. Selain sumber primer, juga dilakukan penelusuran sumber berupa buku-buku di Perpustakaan Pusat Universitas Airlangga, di antaranya adalah buku *H. Rosihan Anwar ; Wartawan Dengan Aneka Citra* karya Tribuana Said dan *Pers Indonesia : Berkomunikasi Dalam Masyarakat Tidak Tulus* karya Jakob Oetama. Selain itu, penulis juga menjadikan koleksi pribadi penulis sebagai sumber, seperti buku *A. Aziz : Wartawan Kita* karya Nurinwa Ki. S. Hendrowinoto.

Selain itu penulis juga menelusuri sumber lainnya yang mendukung penelitian ini. Misalnya sumber pendukung yang didapatkan dari internet yang juga digunakan dalam menambah wawasan. Tetapi sumber-sumber internet yang dipakai hanya sebatas data atau informasi yang dikeluarkan oleh institusi resmi, yang berupa gambar, artikel, maupun

jurnal. Sedangkan data atau informasi yang dikeluarkan oleh selain yang disebutkan di atas maka tidak digunakan. Data-data tersebut dapat digolongkan sebagai sumber sekunder. Di samping itu penulis juga melakukan penelusuran sumber berupa sumber lisan yang diperoleh melalui wawancara kepada narasumber yang terkait.

Tahap yang ke tiga adalah verifikasi, yakni kritik sumber. Terdapat dua jenis kritik sumber, yakni kritik eksteren dan kritik interen. Kritik eksteren dilakukan untuk membuktikan autensitas sumber, apakah sumber yang didapatkan dalam proses heuristik tersebut merupakan sumber asli, turunan, atau palsu. Kritik eksteren dilakukan dengan melihat penampilan luarnya, jika sumber tersebut tertulis. Bagaimana kertas yang digunakan, tintanya dan juga gaya bahasanya. Kritik eksteren juga dilakukan dengan melihat apakah kalimat yang diungkapkan sesuai dengan kalimatnya, dan penggunaan gaya bahasanya, jika sumber berupa lisan. Sedangkan kritik interen digunakan untuk membuktikan kredibilitas sumber. Kritik interen ini dapat dilakukan dengan melihat apakah data tersebut bisa dipercaya atau tidak. Kedua kritik tersebut sangat penting untuk dilakukan agar tidak ada keraguan dalam hasil penelitian yang dilakukan.

Setelah melakukan kritik sumber, selanjutnya adalah interpretasi. Berdasarkan sumber-sumber yang didapatkan, penulis melakukan penafsiran terhadap sumber-sumber tersebut. Namun sebelumnya, penulis membuat klasifikasi terlebih dahulu. Sumber-sumber digolongkan berdasarkan keterkaitan waktu, tema, maupun tempat dengan pembahasan. Sehingga penulisan dapat lebih terfokus dan terstruktur.

Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu penulisan. Pada tahap ini, sumber-sumber yang telah melewati proses kritik dan interpretasi kemudian dirangkai dalam bentuk tulisan. Merangkai sumber-sumber tersebut dilakukan dengan kronologis dan sistematis.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyajian dari hasil penelitian mengenai pemberitaan surat kabar di Surabaya terhadap kebijakan Repelita V tahun 1989-1994 ini, penulis menyusunnya dalam bentuk skripsi yang terdiri dari empat bab. Tiap-tiap bab memiliki keterkaitan dengan rincian sebagai berikut :

BAB I merupakan pendahuluan yang membahas persoalan yang dikemukakan dalam skripsi ini. Bab ini melingkupi : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Batasan dan Ruang Lingkup, Tinjauan Pustaka, Metode dan Sumber Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II memaparkan situasi politik Indonesia secara umum pada periode tersebut. Kemudian menjelaskan tentang kondisi persurat-kabaran di Surabaya. Dan bagaimana kaitan antara keduanya.

BAB III menggambarkan mengenai pemberitaan surat kabar di Surabaya terhadap kebijakan Repelita V tahun 1989-1994. Kemudian usaha-usaha dalam menciptakan wacana publik di kota ini serta dampak apa saja yang ditimbulkan. Lalu yang terakhir studi kasus yang mendukung.

Pada bab terakhir, yaitu BAB IV terdiri dari kesimpulan yang berisi jawaban-jawaban atas rumusan masalah. Pada bagian ini diungkapkan mengenai hasil atau kesimpulan dari persoalan yang dikemukakan dalam penulisan ini.